

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu komponen penting dalam pertumbuhan nasional yaitu pembangunan daerah. Selain meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan penduduk daerah pembangunan daerah juga berupaya mengejar ketertinggalan dan menyelaraskan diri dengan daerah-daerah yang telah berkembang dalam hal produktivitas, pendapatan, upah, serta indikator ekonomi lainnya. Yang dimaksud dengan “konvergensi antar wilayah” adalah menutupnya kesenjangan antardaerah. Dalam model pertumbuhan Solow (1956) dan (1957) yang mengungkapkan bahwa jika teknologi non-rival dapat disebar ke seluruh wilayah negara, maka pendapatan per kapita antar negara akan menyatu, dan dapat menjadi titik awal penelitian untuk menghilangkan disparitas regional atau konvergensi. (Tombolotutu et al., 2019).

Arsyad (1997) menegaskan bahwa konvergensi dan pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai indikator ekonomi yang dapat mencirikan sejauh mana perbedaan atau kesenjangan antara negara kaya dan negara berkembang. Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dapat diberfungsi sebagai proksi pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan pergeseran pertumbuhan penduduk dan komposisi perekonomian. Sedangkan konvergensi sebaliknya, yakni suatu keadaan yang mencirikan semakin menyempitnya kesenjangan maupun disparitas suatu variabel antarwilayah dalam periode waktu tertentu. Azijah et al., (2018)

Pertumbuhan ekonomi merupakan metrik yang penting ketika mengkaji pembangunan ekonomi suatu negara. Karena pemakaian faktor-faktor produksi guna menciptakan barang dan jasa merupakan inti dari kegiatan ekonomi, maka ekspansi ekonomi pada akhirnya akan menumbuhkan pendapatan masyarakat. Aliran manfaat akan dihasilkan dari proses ini bagi faktor-faktor produksi yang masyarakat punya. Diperkirakan dengan tumbuhnya perekonomian maka sebagai pemilik komponen produksi, pendapatan masyarakat juga akan naik. Akan tetapi pada tiap wilayah mempunyai pertumbuhan ekonomi bermacam-macam. Variasi pencapaian pendapatan daerah menjadi penyebab utama terjadinya disparitas laju pertumbuhan ekonomi yang hasilnya dapat menimbulkan ketimpangan. Maka sebab itu, baik masyarakat lokal maupun pemerintah harus bekerja sama untuk memberantas ketimpangan. Salah satu cara yang bisa dijalankan oleh pemerintah yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal atau daerah yang pendapatannya lebih kecil. Dengan cara ini diharapkan daerah-daerah yang tertinggal akan mampu dalam mengejar ketertinggalan ekonomi dari daerah-daerah yang makmur. Fenomena ini dikenal sebagai konvergensi pendapatan. (Mankiw, 2006)

Konvergensi merupakan kondisi ketika perekonomian setiap negara tumbuh dengan cepat, maka terjadi pengurangan kesenjangan pendapatan antara negara atau wilayah kaya dan miskin. Hal tersebut menunjukkan bagaimana konvergensi akan terjadi jika negara-negara dengan pendapatan rendah atau miskin melakukan ekspansi lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi atau kaya, sehingga semua negara akan berada pada tingkat konvergensi yang sama dari masa ke masa. Untuk menjamin tidak adanya perbedaan pembangunan

antar wilayah dalam suatu wilayah, maka daerah-daerah miskin harus melakukan konvergensi guna menyamakan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah-wilayah maju. (Damanik, 2022)

Barro dan Sala-i-Martin (1992) menafsirkan konvergensi yang mana merupakan proses pertumbuhan ekonomii suatu negara/wilayah, menurunkan kesenjangan maupun ketidaksamaan produktivitas, tingkat upah, pendapatan serta faktor lainnya. Dengan kata lain, daerah yang lebih tertinggal/miskin mampu mengikuti ketertinggalan dari daerah makmur sebab menyusutnya pendapatan daerah serta kesenjangan produktivitas antar daerah menyebabkan pertumbuhan yang cepat. Ketimpangan dapat dikurangi dengan menggunakan analisis efek penyebaran. Sebagian besar penyelidikan empiris tentang konvergensi, Barro dan Sala-i-Martin (1995) menggunakan pendekatan berdasarkan konsep Solow-Swan, yakni prediksi konvergensi absolut atau kondisional. Menurut model ini, perekonomian akan berkembang lebih cepat jika semakin menyimpang dari nilai kondisi stabilnya. Oleh karena itu, dalam kondisi stabil yang sama, pertumbuhan pendapatan per kapita negara miskin pada umumnya lebih tinggi dibanding negara-negara kaya. (Wardaya & Landiyanto, 2005)

Konvergensi menurut Barro dan Sala-I-Martin (1992) bisa diestimasi beralaskan dua analisis yakni dengan konvergensi sigma (*sigma convergence*) serta konvergensi beta (*beta convergence*). Adapun *sigma convergence* dihitung berdasarkan tingkat dispersi dari log pendapatan per kapita pada tiap wilayah. Kesenjangan yang terjadi antar provinsi dapat dikatakan semakin menyempit atau terjadi konvergensi sigma apabila dispersi pendapatan semakin turun sepanjang waktu. Kemampuan negara atau wilayah terbelakang untuk berkembang lebih

cepat daripada negara atau wilayah maju dikenal sebagai konvergensi beta. Sedangkan konvergensi beta ditaksir berdasarkan variabel-variabel yang menetapkan dalam konvergensi. Model Solow-Swan juga terkait erat dengan konvergensi ini, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan melambat sebagai akibat dari menurunnya tingkat pengembalian modal (*deminishing return*). Kondisi ini biasa dialami negara kaya atau negara maju, dimana investasi lebih lanjut tidak dapat meningkatkan tingkat pendapatan, sedangkan di negara-negara miskin mayoritas dari sumber daya belum dimanfaatkan secara maksimal dalam proses produksi sehingga memerlukan investasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan pendapatan sehingga daerah tidak akan mengalami peningkatan kesenjangan pendapatan antar daerah karena daerah yang terbelakang akan terus maju mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang lebih kaya atau maju. (Barro & Sala-i-Martin, 1992)

Pertumbuhan neo-klasik memperkirakan bahwa perbedaan pendapatan per kapita antar wilayah/negara akan menyatu seiring berjalannya waktu, karena negara-negara berpenghasilan tinggi yang memimpin dunia dalam hal teknologi hanya dapat maju dengan merangkul teknologi baru, sedangkan negara-negara yang kurang berkembang juga memiliki kapasitas untuk berkembang dengan merangkul teknologi baru, namun juga dengan mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju di masing-masing sektor dan dengan mengalihkan sumber daya dari sektor dengan produktivitas yang rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. (Fukase & Martin, 2020)

Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia mempunyai enam pulau besar dari ribuan pulau yang ada yakni Jawa, Sumatera,

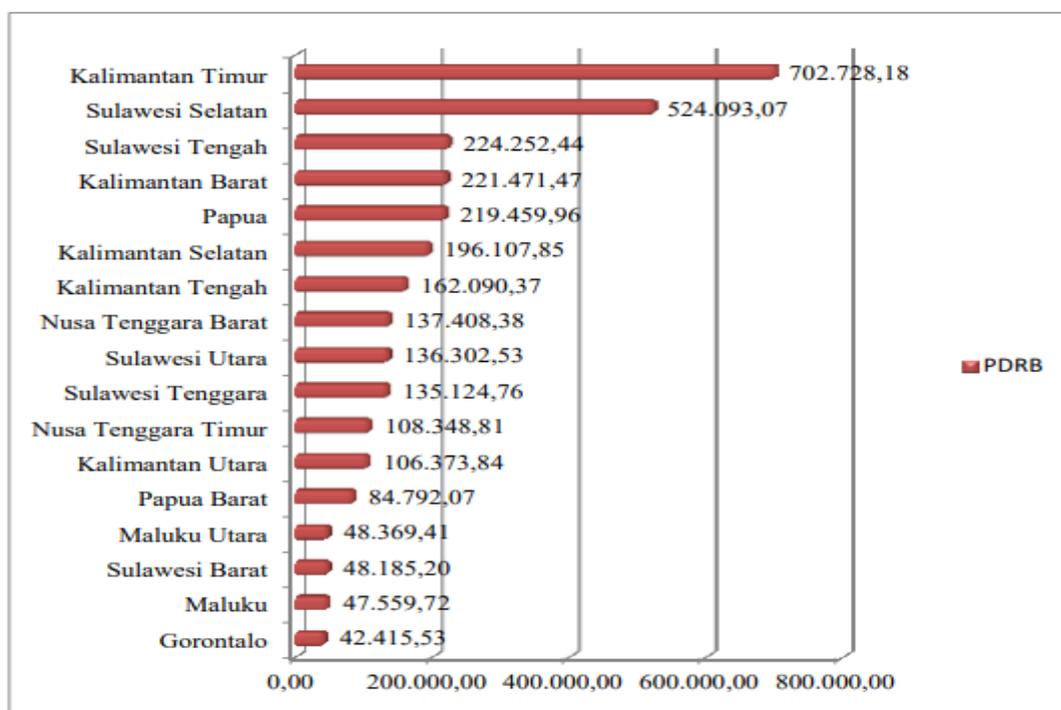
Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua yang menjadi tumpuan perekonomian nasional. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menunjukkan signifikansinya sebagai pusat perekonomian Indonesia. Kontribusi besar Pulau Jawa tidak lepas dari keberadaan ibu kota Indonesia yakni Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan pusat kegiatan perekonomian nasional. Setelah Pulau Jawa, Pulau Sumatera menjadi penyumbang terbesar kedua, disusul pulau-pulau Sulawesi, Kalimantan, serta pulau Maluku dan Papua.

Ketimpangan antarwilayah merupakan permasalahan yang sering menimpa seluruh negara di dunia, baik di negara maju, negara berkembang, maupun negara miskin. Perbedaan wilayah terlihat jelas di Indonesia, khususnya antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) seperti, pulau Jawa dan Luar Jawa, kabupaten dan kota, serta wilayah pedesaan dan perkotaan. Memang benar ketimpangan regional merupakan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Namun jika masalah ini dibiarkan memburuk, hal tersebut akan menimbulkan sejumlah dampak buruk terhadap perekonomian dan masyarakat, termasuk peningkatan kejahatan, migrasi orang dari daerah miskin ke daerah kaya, terciptanya kecemburuan sosial dan kerawanan disintegritas wilayah. Oleh karena itu, untuk menghilangkan disparitas antardaerah, perekonomian daerah-daerah tertinggal harus dipupuk dan didorong agar tumbuh sehingga mampu mengejar ketertinggalan daerah-daerah maju. Pemerintah Pusat masih berupaya untuk mendorong perubahan dan pertumbuhan yang lebih cepat di wilayah Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi sebagai mana yang

diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Dimana menjadi salah satu tujuan yang mesti diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah mengurangi ketimpangan wilayah dengan mendorong pertumbuhan yang lebih pesat di Kawasan Timur Indonesia.

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Gorontalo, Maluku, Papua Barat dan Papua merupakan 17 wilayah yang termasuk ke dalam Kawasan Timur Indonesia. Dengan melihat metrik pendapatan per kapita di setiap provinsi, masih terlihat jelas adanya ketimpangan di 17 provinsi di Kawasan Timur Indonesia.

Gambar 1.1 Grafik Rata-Rata PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022



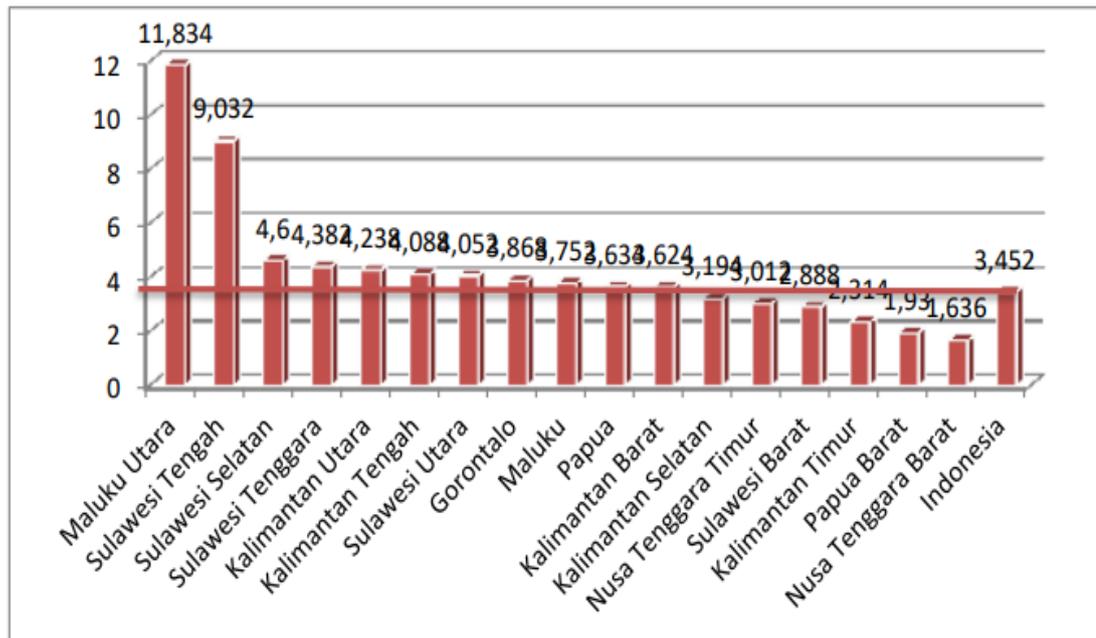
Sumber : Data diolah (Badan Pusat Statistik, 2023)

Pada grafik 1.1 diatas menjelaskan bahwa kontribusi PDRB perkapita di setiap Provinsi pada Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang beragam. Beberapa provinsi mengalami pertumbuhan yang signifikan dan beberapa provinsi lainnya stagnan atau bahkan mengalami penurunan. Jika dilihat dari kontribusinya terdapat dua Provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang paling besar menyumbang terhadap perekonomian Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang mempunyai kontribusi PDRB perkapita paling tinggi yaitu sebesar 702,728 juta rupiah. Provinsi Kalimantan Timur memiliki pertumbuhan PDRB paling pesat, hal tersebut karena didorong oleh sektor pertambangan dan pengolahan terutama minyak kelapa sawit dan batu bara. Kemudian Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan kontribusi PDRB perkapitanya terbesar kedua yaitu sebesar 524,093 juta rupiah. kemudian disusul Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi perkapita sebesar 224,252 juta rupiah. Sedangkan Provinsi Gorontalo mempunyai kontribusi PDRB perkapita paling rendah yaitu sebesar 42,415 juta rupiah.

Pertumbuhan ekonomi regional dan nasional diharapkan akan meningkat secara bersamaan. Untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, kebijakan di setiap daerah harus mempertimbangkan keunggulan dan kekhasan daerah tersebut, namun tetap sesuai dengan kebijakan nasional. Disparitas dalam tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Kawasan Timur Indonesia merupakan indikator yang baik untuk menunjukkan adanya ketimpangan di wilayah tersebut. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada setiap provinsi di Kawasan Timur Indonesia

(KTI) dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dengan memperhatikan pada grafik berikut.

Gambar 1. 2 Grafik Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2018-2022.



Sumber: Data diolah, (Badan Pusat Statistik, 2023)

Grafik 1.2 menunjukkan adanya perbedaan dari tingkat pertumbuhan pada tiap Provinsi yang terdapat di Kawasan Timur Indonesia selama periode tahun 2018-2022. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 11,8%, Provinsi Maluku Utara memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar di antara provinsi yang ada di Kawasan Timur Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh grafik 1.2. Provinsi Sulawesi Tengah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi urutan kedua di Kawasan Timur Indonesia, yaitu sebesar 9,032%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni dengan angka 1,63%. Berdasarkan grafik tersebut dapat juga meninjau provinsi mana saja dengan tingkat pertumbuhan ekonomi diatas maupun dibawah rata-rata

pertumbuhan ekonomi nasional yakni dengan nilai rata rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,45%. Enam provinsi di KTI-Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur , Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat-memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Membandingkan enam provinsi tersebut dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas, pertumbuhan rata-rata Indonesia menunjukkan bahwa jumlah keenam provinsi tersebut secara keseluruhan lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tertentu di Indonesia mampu menopang ekspansi ekonomi negara yang cepat dan bahwa pembangunan di Kawasan Timur Indonesia belum tersebar secara merata.

Berdasarkan paradigma neoklasik, disparitas atau ketimpangan dalam pertumbuhan suatu negara atau wilayah bersifat sementara. Solow memperkenalkan model pertumbuhan neoklasik, yang didasarkan pada asumsi mengenai adanya *diminishing return* dari pertumbuhan modal serta terdapatnya *constant return to scale*. Asumsi ini akan difokuskan pada kapasitas pertumbuhan untuk menggapai kondisi *steady state*. Hal ini nantinya memungkinkan di setiap negara atau wilayah terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi. Menurut paradigma neoklasik Solow tahun 1956, ada tiga asal pertumbuhan: angkatan kerja, stok modal, dan teknologi. Model ini memperkirakan bahwasannya faktor-faktor produksi dapat bermigrasi ke setiap daerah tanpa menemui hambatan apapun. Menurut gagasan ini, modal akan bergerak ke arah yang berlawanan dan tenaga kerja bakal bermigrasi dari wilayah berupah rendah ke daerah berupah

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model pertumbuhan neoklasik pada akhirnya dalam jangka panjang akan menghasilkan konvergensi pendapatan per kapita.

Penelitian terdahulu yang dijalankan oleh Robert J Barro dan Xavier Sala-i-Martin pada tahun 1992 dengan judul penelitian *Convergence* dimana merupakan pelopor dalam studi terkait konvergensi pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai konvergensi yang terjadi di 48 negara-negara bagian Amerika Serikat dengan memakai kerangka model pertumbuhan ekonomi neoklasik. Penelitian tersebut menggunakan data produk nasional bruto dari tahun 1963 dan data pendapatan dari tahun 1840. Temuan studi ini menunjukkan terjadinya konvergensi, tetapi hanya jika penurunan tingkat pengembalian modal ditetapkan sangat lambat, maka studi ini secara matematis konsisten dengan model neoklasik. apabila terdapat seperangkat variabel konstan yang menggantikan variasi karakteristik *steady state* PDB per kapita, hasilnya tetap sama (Barro & Sala-i-Martin, 1992).

Dari uraian diatas, ketidakmerataan pembangunan antarwilayah di Kawasan Timur Indonesia menjadi topik penting untuk dibahas. Dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam jangka panjang, apakah ketimpangan antarwilayah di Kawasan Timur Indonesia akan semakin berkurang dan pertumbuhan wilayah miskin dapat mengejar keteringgalan terhadap wilayah maju sehingga terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi antar Provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Maka sebab itu, penulis tertarik mempelajari lebih lanjut mengenai **“ANALISIS KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN TIMUR INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah terjadi konvergensi sigma antar provinsi di Kawasan Timur Indonesia?
2. Apakah terjadi konvergensi absolut dan konvergensi kondisional antar provinsi di Kawasan Timur Indonesia?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses percepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Kawasan Timur Indonesia?
4. Berapa besar kecepatan konvergensi yang dihasilkan setiap tahun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konvergensi sigma antar provinsi di Kawasan Timur Indonesia.
2. Untuk mengetahui konvergensi absolut dan konvergensi kondisional antar provinsi di Kawasan Timur Indonesia.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses percepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Kawasan Timur Indonesia.
4. Untuk mengetahui seberapa besar kecepatan konvergensi yang dihasilkan setiap tahun.

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan permasalahan dalam penelitian ini dilakukan agar lebih jelas seberapa besar permasalahan yang ingin diteliti dan menjamin penyelidikan dilakukan dengan fokus. Tujuan penelitian ini yakni guna mendapati kinerja ekonomi daerah dengan memanfaatkan variabel-variabel yang terkait dengan tingkat konvergensi yang telah ditemukan.

Dalam penelitian ini memakai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia selama 5 tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Selain itu, akan diketahui apakah perkembangan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia, yang diukur dengan PDRB per kapita, mengarah pada proses yang akan mengurangi kesenjangan (konvergen), atau sebaliknya.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Penulis

Penelitian ini menjadi sarana penulis dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan menambah wawasan penulis mengenai proses terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Timur Indonesia.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi topik penelitian yang sejenis serta mampu digunakan sebagai sarana pembelajaran.

3. Praktisi

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan pengetahuan untuk pertimbangan dalam memutuskan keputusan terkait kebijakan pemerataan ekonomi.